



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1/KEP/B4/2017
TENTANG
DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Daftar Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan daftar program penyusunan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan.

KEDUA : Daftar program Penyusunan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

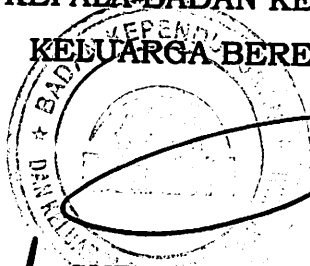
- KETIGA** : Pemrakarsa menetapkan jadwal pembahasan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara berkala kepada Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa harus berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA** : Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat melakukan fasilitasi dan evaluasi perkembangan penyusunan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Kepala Badan.
- KEENAM** : Apabila Pemrakarsa akan melakukan penyusunan Peraturan Kepala Badan di luar dari daftar program penyusunan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Badan ini, maka Pemrakarsa harus mendapatkan ijin prakarsa dari Kepala Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2017

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**



SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1/KEP/B4/2017
TENTANG
DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2017

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	2	3
1	Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif keuangan, kepegawaian, dan Non Keuangan dan Non Kepegawaian	BIRUM
2	Pengelolaan Arsip dinamis di lingkungan BKKBN	BIRUM
3	Pedoman Klasifikasi Keamanan dalam Hak Akses Arsip	BIRUM
4	Pedoman Penerapan dan Penilaian Disiplin Pegawai di Lingkungan BKKBN	BIPEG
5	Pedoman Pemberian tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan BKKBN	BIPEG
6	Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan BKKBN	BIPEG
7	Pedoman cuti PNS	BIPEG
8	Pedoman Pola Karir PNS	BIPEG
9	Pedoman Pemberian Tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS di lingkungan BKKBN	BIPEG
10	Pedoman Pelaksanaan Revolusi Mental bagi ASN BKKBN	BIPEG
11	Pedoman Pemberian Izin dan Tugas Belajar di Lingkungan BKKBN	BIPEG
12	Standar Kompetensi jabatan	BIPEG
13	Pedoman Penyusunan Data Basis Perencanaan	BIREN
14	Pedoman Penyusunan RPJMD program KKBPK	BIREN
15	pedoman tata naskah dinas	BIHOM
16	Pedoman tata cara penyusunan Peraturan Kepala BKKBN	BIHOM
17	Fasilitasi Penyelesaian Bantuan Hukum	BIHOM
18	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	BIHOM
19	Pedoman Standardisasi Pakaian Kerja	BIHOM
20	Pedoman Kehumasan dan Peliputan Media Massa di Lingkungan BKKBN	BIHOM
21	Pedoman Pembina Wilayah	BIHOM
22	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran di lingkungan BKKBN	BIKUB
23	Pedoman penyelenggaraan Rapat Pengendalian Proyek Nasional (RAYEKNAS) di lingkungan BKKBN	BIKUB
24	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKKBN	BIKUB
25	Pedoman Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Anggaran yang Dialokasikan Ke Kabupaten/Kota	BIKUB
26	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	BIKUB
27	Pedoman Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Lingkungan BKKBN	BIKUB
28	Pedoman Pengelolaan Asset tak berwujud di Lingkungan BKKBN	BIKUB
29	Pengembangan Model Kegiatan dan Penetapan Wilayah Andalan untuk Program Pelatihan Internasional di bidang KKBPK pada 6 Provinsi	PULIN

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	2	3
30	Penyelenggaraan beasiswa studi jangka panjang program S2 dan S3 Luar Negeri	PULIN
31	pedoman pengelolaan diklat KKB	PULAP
32	Panduan Pelaksanaan TOT Sistem Informasi Keluarga	PULAP
33	Panduan TOT pelatihan revolusi mental berbasis pancasila bagi ASN BKKBN	PULAP
34	Pedoman Pengeolaan Kampung KB	PULAP
35	Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	PUSNA
36	Pedoman Uji Klinik Alat dan Obat Kontrasepsi Program Keluarga Berencana di Indonesia	PUSNA
37	Pedoman Tata Kerja Etika Penelitian	PUSNA
38	Uraian pekerjaan jabatan fungsional peneliti BKKBN	PUSDU
39	Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DITBINHUB
40	Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	DITBINHUB
41	Pedoman Penyusunan Naskah Kerjasama Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	DITBINHUB
42	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Revitalisasi Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Kerjasama BKKBN Dengan TNI Tahun 2013	DITBINHUB
43	Standardisasi perangkat TIK	DITTIFDOK
44	Pedoman data non rutin khusus	DITLAPTIK
45	Pedoman data non rutin luar biasa	DITLAPTIK
46	Pedoman penetapan instrumen untuk pengukuran penyajian evaluasi KPI	DITLAPTIK
47	Pedoman instrumen / monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	DITLAPTIK
48	pedoman kerjasama pemanfaatan data	DITLAPTIK
49	Penyusunan kebijakan standarisasi data dan informasi KKBPK	DITLAPTIK
50	Pedoman Pelaksananan Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra	DITBINLAP
51	Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana	DITBINLAP
52	Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB	DITBINLAP
53	Pedoman Pengelolaan PKB/PLKB	DITBINLAP
54	Pedoman Pendayagunaan PKB/PLKB	DITBINLAP
55	Pedoman Pemanfaatan Smart Phone bagi PKB/PLKB	DITBINLAP
56	Pedoman Peningkatan kapasitas PKB/PLKB	DITBINLAP
57	Pedoman pembinaan PPKBD dan Sub-PPKBD	DITBINLAP
58	Pedoman/Juknis Penyuluh KB dan Angka Kreditnya	DITBINLAP
59	Pedoman Mekanisme Operasional Program KKBPK Lini lapangan	DITBINLAP
60	Pedoman operasional integrasi program pembangunan lintas sektor dalam Kampung KB	DITBINLAP
61	Pedoman Mekanisme Operasional Kampung KB	DITBINLAP
62	Panduan Pelaksanaan KIP konseling	DITVOKKOM
63	Pedoman Penyelenggaraan anugerah Kencana	DITVOKKOM
64	Panduan pengembangan strategi advokasi program KKBPK dengan pendekatan Advance Family Planning	DITVOKKOM

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	2	3
65	Panduan pengembangan advokasi KIE melalui bauran media	DITVOKKOM
66	Panduan membangun motivasi menjadi peserta KB	DITVOKKOM
67	Pedoman Akselerasi Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Melalui New Inisiatif	DITBALNAK
68	Pedoman Kemitraan	DITBALNAK
69	Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Anak	DITBALNAK
70	Modul Pelatihan BKB	DITBALNAK
71	Pedoman Operasional Ketahanan Keluarga balita dan Anak	DITBALNAK
72	Strategi Nasional Program Bina Keluarga Balita dan Anak 2014-2025	DITBALNAK
73	Pedoman Pembinaan Ketahanan keluarga lansia	DITHANLAN
74	Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DITHANLAN
75	Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) pada Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga di Kecamatan	DITHANLAN
76	Strategi operasional bidang KSPK	DITHANLAN
77	Pengelolaan Ketahanan Lansia	DITHANLAN
78	Pedoman GENRE CERIA 2017	DITHANREM
79	Pedoman pengelolaan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS	DITPEMKON
80	pedoman pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS	DITPEMKON
81	pedoman teknis data basis online kelompok UPPKS	DITPEMKON
82	pedoman strategi promosi program pemberdayaan ekonomi keluarga	DITPEMKON
83	pedoman pendampingan mitra kerja	DITPEMKON
84	peningkatan akses modal	DITPEMKON
85	Pedoman Pelayanan KB Bergerak	DITJALSUS
86	pedoman KB Pria	DITJALSUS
87	pedoman penggarapan KB wilayah Galciltas	DITJALSUS
88	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sampling Obat Kontrasepsi pada Gudang dan Tempat penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi	DITJALPEM
89	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Bagi Pemerintah Daerah	DITJALPEM
90	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Bagi Pemerintah Pusat	DITJALPEM
91	Standarisasi Pelayanan KB	DITJALPEM
92	Pedoman Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional	DITJALPEM
93	pedoman penggerakan dan ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	DITJALPEM
94	Petunjuk teknis penyusunan rencana distribusi Alokon	DITJALPEM

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	2	3
95	Pedoman Jaga Mutu Pelayanan KB	DITJALPEM
96	Rumusan Kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi untuk Laparoscopy	DITJALPEM
97	Pembinaan pasca pelayanan pada faskes pemerintah	DITJALPEM
98	Penguatan Penyusunan kebijakan penguatan dan pemberdayaan UKBM dalam program Kampung KB	DITJALPEM
99	Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana Mandiri	DITJALSWA
100	Pedoman standardisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama penyelenggara pelayanan KB	DITJALSWA
101	Pedoman standardisasi kompetensi tenaga pelayanan kompetensi	DITJALSWA
102	Pedoman mekanisme operasional pelayanan KB difaskes swasta yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan	DITJALSWA
103	Pedoman Registrasi, standardisasi, akreditasi, fasilitasi, dan rekognisi faskes swasta	DITJALSWA
104	Pedoman monev	DITJALSWA
105	Pedoman pelaksanaan dan pembinaan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	DITKESPRO
106	Pedoman KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DITKESPRO
107	Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Pemakaian Kondom Dual Protection	DITKESPRO
108	Pedoman Forum Peduli Kesehatan Reproduksi	DITKESPRO
109	Pedoman Operasional Pendidikan Kependudukan melalui KKN tematik di Perguruan Tinggi	DITPENDUK
110	Pedoman Operasional Pendidikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SLTP/SLTA	DITPENDUK
111	Pedoman Sistem Pembinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan bagi Para Pengelola dan Pendidik Kependudukan	DITPENDUK
112	Pedoman Rintisan Model Solusi Dampak Kependudukan	DITDAMDUK
113	Pedoman Model Integrasi Solusi Strategis Dampak Kependudukan Tingkat Mikro melalui Rumah Data Kependudukan	DITDAMDUK
114	panduan integrasi kebijakan kependudukan ke dalam rencana pembangunan	DITJAKDUK
115	Panduan Penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk provinsi, kabupaten dan kota	DITJAKDUK
116	Pedoman panduan aplikasi spectrum dan FPET untuk pelaksana teknis	DITRENDUK
117	Pedoman panduan aplikasi spectrum dan FPET untuk pemangku kebijakan	DITRENDUK
118	Pedoman Pusat Data Kependudukan Berbasis Keluarga	DITRENDUK
119	Penanganan benturan kepentingan	IRTAMA/IRWIL III
120	Pengendalian Gratifikasi	IRTAMA/IRWIL II
121	Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan BKKBN	IRTAMA/IRWIL II
122	Pedoman Pelaksanaan ADTT	IRTAMA/IRWIL III

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SURYA CHANDRA SURPATY